



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN JOMBANG**

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 132 Jombang

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku baik umum (public) atau Pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara :

- a) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah
- b) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- c) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah
- d) Pelaksanaannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan

Implementasi dari perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah melalui rencana kerja yang disusun oleh masing-masing OPD. Rencana kerja tersebut disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam renstra OPD dan RPJMD. Dengan demikian penetapan plafon anggaran dan penyusunan program/kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan masing – masing OPD dapat tepat sasaran sehingga pada akhir tahun ke lima dapat tercapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan RPJMD.

Jombang, 12 Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jombang



FAHRUDIN WIDODO, S.H., M.M
NIP. 19641219199003100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	I
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	6
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	6
TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III	51
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	51
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54
3.3 Program Dan Kegiatan	56
BAB IV.....	69
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	69
BAB V	76
PENUTUP.....	76
5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	76
5.2 Rencana Tindak Lanjut	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 -2026. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan ini berdasar pada RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2024 - 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

Dalam penyusunan renja tahun 2025, telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2023 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2024. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, baik di Jawa Timur maupun nasional.

Koperasi dan Usaha Mikro di kabupaten Jombang memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai lebih dari 862 unit dan Usaha Mikro yang tercatat sejumlah 13.128 pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melihat besarnya jumlah koperasi dan Usaha Mikro ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Selain itu, dengan terjadinya pandemic covid – 19 berpengaruh pada perekonomian dan mendorong terjadinya perubahan – perubahan pada masyarakat sehingga juga berdampak pada perubahan pola bisnis pada koperasi dan Usaha Mikro.

Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan Usaha Mikro. Sehingga baik koperasi maupun usaha mikro harus mampu untuk

berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang berfokus pada peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pengelola koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Jombang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024, yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024 - 2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Jombang tahun 2024-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang pada tahun 2024 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di kabupaten Jombang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TH LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2018 - 2023. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha mikro kabupaten Jombang, isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap RKPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2025. Adapun evaluasi renja tahun 2024 didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2024-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Dalam mencapai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024 – 2026, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten jombang mengampu 7 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan :

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan :

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan :

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan :

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan :

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

c. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

6. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan :

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan :

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

7.1 Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.2 Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

7.3 Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

7.4 Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7.5 Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7.6 Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan perkiraan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan tahun 2024 disajikan melalui tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun (N-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)		Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)				Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=5+7+9		11=10/4		
2,17	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro																	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50	%	50	%
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50	%	50	%

		perkantoran																
2.17.01.2. 06.0001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	6	jenis	6	paket	6	paket	100	%	6	paket	3	paket	50	%
2.17.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	paket	4	jenis	4	paket	4	paket	100	%	36	paket	15	paket	42	%
2.17.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	2	jenis	2	paket	2	paket	100	%	2	paket	1	paket	50	%
2.17.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	paket	2	jenis	3	paket	3	paket	100	%	24	paket	12	paket	50	%

2.17.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	2	jenis	1	Dok	1	Dok	100	%	12	dok	6	dok	50	%
2.17.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	25	kali	2	Lap	2	Lap	100	%	12	laporan	6	laporan	50	%
2.17.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			100	%	0	unit	0	0	0	%						
2.17.01.2. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor			1	ged	0	0	0	0	0	0	0	unit	0	0	0	%

2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50	%	50	%
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	1	rek	1	Lap	1	Lap	100	%	1	lap	1	lap	100	%
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	3	rek	4	lap	4	lap	100	%	12	lap	6	lap	50	%
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	6	rek	4	lap	4	lap	100	%	12	lap	6	lap	50	%
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50	%	50	%

	Pemerintahan Daerah																	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100	%	1	unit	1	unit	100	%
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan , pajak dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	16	unit	15	unit	15	unit	100	%	15	unit	15	unit	100	%
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	44	unit	27	unit	27	unit	27	unit	100	%	43	unit	20	unit	45,45	%

	kantor atau bangunan lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100	%	100	%	-	-	-	-	100	%	100	%	-	%	0	%
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16	orag	19	pa ket	-	-	-	-	100	%	16	org	0		0	%
2.17.01.2.01	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50	%	50	%

2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	3	dok	3	dok	3	dok	100	%	2	dok	1	dok	33,33	%
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dok	5	dok	5	dok	5	dok	100	%	5	dok	3	dok	60	%
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	50	%	50	%
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	16	org/bulan	14	bulan	16	org/bulan	16	org/bulan	100	%	16	org/bulan	16	org/bulan	100	%

		Tunjangan ASN																
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dok	12	kali	4	lap	4	lap	100	%	4	dok	2	dok	50	%
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17	lap	17	lap	17	dok	17	dok	100	%	17	Lap	8	Lap	47	%
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	lap	1	lap	1	dok	1	dok	100	%	1	lap	1	lap	100	%

		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	80	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	%	53	%	66,25	%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	90	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	%	100	%	111,11	%
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	65	unit usaha	6	kop	5	kop	6	kop	120	%	17	unit usaha	62	unit usaha	95,38	%

	Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	65	%	45	%	50	%	50	%	100	%	55	%	38	%	58,46	%
2.17.03.2. 01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	65	%	N/A	55	%	38,2	%	58,77	%							

2.17.03.2. 01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	240	unit usaha	N/A	80	unit usaha	52	unit usaha	21,66 6667	%							
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	21	%	N/A	10	%	14	%	67	%							
2.17.06.2. 01	Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	22	%	N/A	10	%	14	%	63,64	%							

2.17.06.2. 01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	210	unit usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	unit usaha	103	unit usaha	49,0	%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Kompeten	27	%	3,99	%	3,5	%	4,6	%	131	%	7,8	%	9,89	%	36,63	%
2.17.05.2. 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	13	%	3,99	%	3,5	%	4,6	%	131	%	3,23	%	3,66	%	28,15	%

	Kabupaten/ Kota																	
2.17.05.2. 01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500	orang	221	ko p	40	org	160	org	400	%	300	org	300	org	60	%
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkatkan Omset	4	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	%	4,57	%	114,25	%
2.17.07.2. 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	3,5	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5	%	1,5	%	42,86	%

	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	540	unit usaha	1,144	um	40	unit	40	unit usaha	40	unit usaha	20	unit usaha	47	unit usaha	8,70	%
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	750	orang	2	do k	20	org	20	org	20	org	295	org	150	org	20,00	%

2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkatkan kualitasnya	60	%	N/A	20	%	16,44	%	27,40	%							
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	1	%	N/A	0,8	%	1,11	%	111	%							
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90	unit usaha	N/A	30	unit usaha	24	unit usaha	26,67	%							

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya secara umum pada semua program / kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan realisasi tribulan 2 tahun 2024 telah tercapai target sesuai yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut :

1. Semua Program / kegiatan memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Program / kegiatan sampai tribulan 2 tahun 2024 telah memenuhi target kinerja yaitu sebesar
 - Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / kota dengan capaian kinerja sebesar 50%
 - Program Pelayanan Izin usaha simpan pinjam dengan capaian kinerja sebesar 66,25%
 - Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan capaian kinerja sebesar 58,46%
 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan capaian kinerja sebesar 67%
 - Program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan capaian kinerja sebesar 36,63%
 - Program Pengembangan UMKM dengan capaian kinerja sebesar 27,40%
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan yaitu
 - Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 114,25% dari target yang telah ditetapkan.
4. Faktor – faktor penyebab terpenuhi dan melebihi target kinerja program / kegiatan yaitu :
 - Ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan intensif
 - Adanya komunikasi yang terjalin baik antara Dinas Koperasi dan usaha Mikro dengan pihak eksternal pengguna layanan (masyarakat)
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah Memperhatikan pencapaian target Program yang sebagian besar telah terpenuhi bahkan melebihi target, maka diharapkan pengambilan kebijakan dan penyediaan anggaran dapat mendorong pelaksanaan kegiatan dengan melakukan berbagai inovasi, sehingga kedepan perkembangan ekonomi serta kegiatan perkoperasian dan usaha

mikro menjadi lebih baik serta mampu tampil dan bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi nasional bahkan internasional.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
 - Memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro secara berkelanjutan
 - Membuat/memperbarui dan mengembangkan media komunikasi informasi melalui pengembangan IT terkait sosialisasi, promosi dan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro
 - Membuat media komunikasi dan informasi yang dipublikasikan melalui pemanfaatan media sosial / IT
 - Bekerjasama dengan lembaga-lemba pariwisata di tingkat Kota maupun di Jawa Timur untuk mempromosikan berbagai produk koperasi dan usaha mikro yang ada
 - Mengembangkan kompetensi pelaku koperasi dan usaha mikro melalui lembaga peningkatan kompetensi
 - Monitoring dan evaluasi secara periodik untuk secara lebih cepat dapat mengambil kebijakan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang berdasar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun serta proyeksi capaian indikator kinerja utama pada tahun 2024 dan 2025 yang berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

NO	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	IKK	Realisasi Renstra PD				Target Renstra		Keterangan
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase koperasi Berkinerja Baik			9,2%	9,6%	9,7%	9,8%	N/A	N/A	1. Untuk indikator persentase koperasi berkinerja baik berlaku dari tahun 2020-2023 untuk tahun 2024 - 2026 berubah menjadi persentase peningkatan koperasi aktif dan persentase pertumbuhan asset koperasi. 2.Persentase usaha mikro aktif berlaku mulai tahun 2021 -2023 berubah menjadi persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas usaha
1	Persentase peningkatan koperasi aktif			N/A	N/A	N/A	N/A	1%	2%	
2	Prosentase pertumbuhan Asset koperasi			N/A	N/A	N/A	N/A	20%	23%	
2	Persentase usaha mikro aktif			N/A	2,5%	3%	3,5%	N/A	N/A	
3	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai legalitas usaha			N/A	N/A	N/A	N/A	5%	6%	
4	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			69	72,71	75	78	78	79	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 serta proyeksi tahun 2024 dan 2025. Dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha mikro dalam mencapai kinerjanya dari tahun ke tahun selalu dapat mencapai target yang diharapkan.

Koperasi berkinerja baik yang diukur melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang dilakukan secara berkelanjutan walaupun dari sisi internal Dinas koperasi dan Usaha Mikro masih kekurangan SDM yang berkompeten di bidang perkoperasian.

Usaha Mikro aktif juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan upaya pengembangan dan pemberdayaan kepada usaha mikro serta adanya pelatihan dan juga upaya peningkatan akses pemasaran melalui pameran yang diikuti maupun yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah, maka telah dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal, isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang tidak paham tentang perkoperasian. 2. Masih rendahnya Koperasi bergerak di Sektor Jasa Keuangan yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam

		3. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar Koperasi di kab Jombang hanya mempunyai Usaha Simpan Pinjam 2. Masih lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi 3. Rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperas
3.	Pemberdayaan Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Mikro 2. Terbatasnya modal dan akses ke lembaga keuangan 3. Kurang optimalnya pelaku usaha mikro dalam menangkap peluang pasar 4. Kurangnya data usaha mikro yang update dan mendetail 5. Masih lemahnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha mikro

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	6.617.610.726	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	4.083.269.892,75	
2.17.01.2.01	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Jombang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	100%	95.000.000	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Jombang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	100%	8.919.450	
2.17.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	4.590.850	

2.17.01.2.01.006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	55.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	4.328.600
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	4.143.621.966	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	3.197.100.579,75
2.17.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 org/bln	3.940.776.966	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	3.036.320.579,75
2.17.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	178.698.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	151.692.000
2.17.01.2.02.007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5 laporan	13.107.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	17 laporan	5.184.000

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
2.17.01.2.02.005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	11.040.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.904.000
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	9.600.000
2.17.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 paket	9.600.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	623.097.860	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	373.791.150
2.17.01.2.06.001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.708.110	<i>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.059.750

2.17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	246.169.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	169.382.600
2.17.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	110.188.000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	75.850.000
2.17.01.2.06.005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	35.201.800	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	27.514.800
2.17.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dok	21.659.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dok	16.704.000
2.17.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 lap	199.171.950	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	72.280.000
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.082.204.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	0%	0
2.17.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	15 unit	154.852.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	0	0
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang	100%	352.130.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang	100%	353.568.000

	Pemerintahan Daerah		urusan pemerintah daerah			Pemerintahan Daerah		urusan pemerintah daerah			
2.17.01.2.08.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 lap	151.800.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	142.800.000	
2.17.01.2.08.004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	198.830.400	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	210.768.000	
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1.500.000						
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	321.556.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	140.290.713	
2.17.01.2.09.001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.401.500	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.110.000	

2.17.01.2.09.002	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	172.081.500,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	61.450.713
2.17.01.2.09.010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	55.073.500	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	28.730.000
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	70%	82.259.000	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	70%	43.488.150
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	85%	82.259.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	85%	43.488.150

2.17.02.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 unit usaha	82.259.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit usaha	43.488.150
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kab. Jombang	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	60%	690.345.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kab. Jombang	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	60%	56.511.850
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase koperasi yang diawasi	60%	690.345.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase koperasi yang diawasi	60%	56.511.850

2.17.03.2.01.004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	160 unit usaha	690.345.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 unit usaha	56.511.850
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang Kompeten	18%	450.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang Kompeten	18%	145.380.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	10%	450.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	10%	145.380.000
2.17.05.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 org	450.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	135 org	145.380.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	14%	500.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	14%	163.620.000

2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	17%	500.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	17%	163.620.000
2.17.06.2.01.005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	160 unit usaha	500.000.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	85 unit usaha	163.620.000
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	3,50 %	810.000.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	3,50 %	606.945.000

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	3%	810.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	3%	606.945.000	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160 Orang	100.000.000,0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 org	295.000.000	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1 Unit	125.000.000						
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 unit usaha	75.000.000						
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Jombang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2220 Unit Usaha	70.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Jombang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	138.147.000	

2.17.07.2.01.004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	360 Unit Usaha	200.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	35 unit usaha	173.798.000	
2.17.07.2.01.005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	630 Orang	240.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0,00	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	40%	400.000.000	Program Pengembangan UMKM	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	40%	293.055.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	0,9%	400.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	0,9%	293.055.000	

2.17.08.2.01.006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	85 unit usaha	400.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	75 unit usaha	293.055.000
------------------	--	---------------------	---	----------------------	-------------	--	---------------------	---	---------------	-------------

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak indikator program kegiatan yang tidak sesuai dengan uraian program kegiatan dalam rencana strategis. Indikator-indikator tersebut selanjutnya telah disesuaikan dalam kolom analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut merupakan usulan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Jombang

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	
2.17.01.2.01	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Jombang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	100%	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 laporan	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	

2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 paket	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	
2.17.01.2.06.0001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jombang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	0%	
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	0	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	

2.17.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
01.2.08.0001					
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	70%	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	85%	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit usaha	
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kab. Jombang	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	60%	

2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase koperasi yang diawasi	60%
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 unit usaha
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang Kompeten	18%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	10%
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	135 org
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	14%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	17%
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	85 unit usaha
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	3,50%

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	3%	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 org	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Jombang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	35 unit usaha	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	Kab. Jombang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	40%	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Jombang	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	0,9%	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Jombang	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	75 unit usaha	

Dalam melakukan pengembangan pelayanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang memiliki beberapa tantangan dan peluang, yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut uraian yang telah teridentifikasi

a. Faktor Internal :

1. Semakin berkurangnya SDM yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang karena purna tugas dan mutasi;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi SDM Koperasi dan Usaha Mikro tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Usaha Mikro, baik yang dilaksanakan oleh OPD peningkatan SDM PNS di Kabupaten, Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI;
3. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan formal pegawai seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tugas dan fungsi dinas yang semakin besar dan semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Banyaknya peraturan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga semakin tertib administrasinya.

b. Faktor Eksternal :

Dengan semakin bertambahnya jumlah koperasi di kabupaten Jombang yaitu tercatat pada tahun 2023 sebanyak 718 koperasi aktif dan juga 13.128 Usaha Mikro, membawa dampak peningkatan konsentrasi pembinaan kearah ketrampilan pembukuan, penyusunan laporan, fungsi dan teknik pengawasan koperasi, manajemen pengelolaan perkoperasian maupun pengembangan usaha bagi anggota, maupun pembinaan

kewirausahaan. Dengan semakin banyaknya jumlah Koperasi dan Usaha Mikro tersebut, maka meningkat juga permasalahan yang ditimbulkan antara lain :

1. Masih munculnya Lembaga Keuangan (Koperasi) illegal yang beroperasi di desa-desa yang merugikan pelaku usaha mikro di pedesaan;
2. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;
3. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
4. Munculnya banyak wirausaha baru di pedesaan yang tidak teridentifikasi sehingga menyulitkan dalam pembinaan;
5. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk Usaha Mikro dalam arena promosi maupun pemasaran;
6. Belum sepenuhnya diterima produk skala mikro dengan hasil makanan dan minuman di pasar modern;
7. Masih lemahnya pemahaman dan kemandirian Usaha Mikro terhadap perijinan.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan usaha Mikro adalah hasil telaah terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Pada tabel 2.5 berisi usulan – usulan dari pemangku kepentingan dan diakomodir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun
2024
Kabupaten Jombang

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Di Kec. Diwek	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan	1 unit	Penyediaan pengayoman bagi sentral kampung kue

			Terhadap Usaha Mikro		
2	Pembinaan dan fasilitasi legalitas bagi pelaku usaha mikro.	Di Kabupaten Jombang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Pembinaan dan fasilitasi legalitas bagi pelaku usaha mikro.
3	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Di Kabupaten Jombang	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Adanya Promosi bagi produk unggulan Jombang, antara lain kecap produk Jombang
4	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Di Kabupaten Jombang	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Fasilitasi pameran bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Jombang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan;
- 3) Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Urusan Koperasi dan UMKM mendukung agenda pertama dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Target yang ingin dicapai yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM dengan indikator Rasio kewirausahaan nasional, Pertumbuhan wirausaha baru, Persentase UMKM yang melakukan kemitraan, Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, serta Pertumbuhan volume usaha koperasi. Untuk mewujudkan target – target tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan yaitu Penguatan kewirausahaan dan UMKM yang dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- 3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- 4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha;
- 5) Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah;
- 6) Meningkatkan nilai tambah usaha – usaha sosial.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong. Dengan memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat tersebut, maka ini sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tiga tahun ke depan. Keduanya menitikberatkan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro pada aspek produksi, pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran serta peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro.

Arah kebijakan pembangunan nasional telah diterjemahkan melalui Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan produktivitas untuk transformasi

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diarahkan pada delapan arah kebijakan yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan penanganan disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Adapun terhadap urusan Koperasi dan UMKM masuk pada arah kebijakan keempat yaitu mendorong pemulihan dunia usaha yang dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM yang ditandai dengan pencapaian :

- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,5%
- b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9 – 4,2%
- c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76 – 6,06 Miliar
- d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%
- e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp 1.279 triliun

Sasaran dan prioritas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui lima arahan utama Presiden sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjsama industry dan talenta global
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan Undang – Undang Cipta Kerja
4. Penyederhaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung arahan tersebut, diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Koperasi dan UMKM masuk dalam agenda pembangunan ini yang diturunkan ke dalam Program prioritas Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi dengan Kegiatan prioritas :
 - a. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha mikro kecil dan Usaha menengah besar
 - b. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
 - c. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, dan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan public

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan di implementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Berikut merupakan

target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten jombang pada tahun 2024

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha mikro kabupaten Jombang tahun 2024 yaitu

- a. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi setiap tahun dengan memperhatikan 8 area perubahan yaitu
 1. Manajemen Perubahan
 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 4. Penataan Tata Laksana
 5. Penataan Sumber Daya Manusia
 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 7. Penguatan Pengawasan
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan kontribusi Usaha Mikro dalam perekonomian daerah dengan indikator persentase peningkatan omset Usaha Mikro. Peningkatan omset usaha mikro dihitung dari omset tahun sebelumnya dibandingkan dengan omset tahun yang dihitung. Indikator ini dipilih karena untuk mengukur kontribusi usaha mikro berarti dengan meningkatkan omset pelaku usaha yang nantinya berdampak langsung pada pendapatan.
- c. Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian yang dihitung dengan indikator meningkatnya koperasi sehat dan meningkatnya pertumbuhan modal koperasi.

Sasaran yang merupakan target/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang pada tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Usaha Mikro yang berkembang
3. Meningkatnya Koperasi Aktif
4. Meningkatnya pertumbuhan asset koperasi

3.3 Program Dan Kegiatan

Berdasar pada Rencana Strategis tahun 2024 - 2026, Terdapat 6 (enam) Program Pembangunan dan 1 (satu) Program Rutin yaitu:

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan sasaran program untuk Melakukan Fasilitasi pengajuan izin usaha simpan pinjam Koperasi
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sasaran program untuk Melakukan Pengawasan atas kelembagaan dan kegiatan usaha Koperasi
- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan sasaran program untuk Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan
- 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran program untuk Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan pada aspek kelembagaan Koperasi serta meningkatkan kualitas produk dan usaha koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi koperasi, serta perluasan akses pemasaran produk koperasi
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sasaran program untuk Meningkatkan pemberdayaan UKM pada aspek kelembagaan, produksi, perluasan akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar produk UKM
- 6) Program Pengembangan UMKM dengan sasaran program untuk Meningkatkan kualitas produk UKM serta peningkatan kualitas pemasaran produk UKM.

Sedangkan Satu Program Rutin yang bersifat Kesekretariatan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang. Di dalamnya terdapat enam kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Proses Perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah sudah melaksanakan/mengakomodasi kepentingan pengarusutamaan responsive gender. Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Koperasi dan Usaha mikro kabupaten Jombang pada tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

Table 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun 2025)				Catatan	Prakiraan Maju (tahun 2026)	
			Lokasi	Target Catatan Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kab. Jombang	100%	4.083.269.892,75	APBD		100%	6.486.090.036
2.17.01.2.01	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	Kab. Jombang	100%	8.919.450	APBD		100%	105.000.000
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	2 dok	4.590.850	APBD		3 dok	45.000.000

2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	5 laporan	4.328.600	APBD		5 laporan	60.000.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Jombang	100%	3.194.607.579,75	APBD		100%	4.738.460.561
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	15 orang	3.036.320.579,75	APBD		19 orang	4.531.893.511
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	4 dok	149.472.000	APBD		4 dok	178.698.000
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Jombang	17 laporan	4.740.000	APBD		5 laporan	15.173.050
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab. Jombang	1 laporan	4.075.000	APBD		1 laporan	12.696.000

		Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Jombang	100%	9.600.000	APBD		100%	14.400.000
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	16 paket	9.600.000	APBD		36 paket	14.400.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jombang	100%	374.562.563	APBD		100%	706.362.540
2.17.01.2.06.0001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	1 paket	12.000.000	APBD		1 paket	12.314.327
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	4 paket	166.858.500	APBD		4 paket	283.094.350
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	2 paket	79.160.000	APBD		2 paket	120.216.200

2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 paket	27.641.600	APBD		2 paket	37.882.070
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 dok	16.704.000	APBD		1 dok	23.807.850
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	2 laporan	72.198.463	APBD		2 laporan	229.047.743
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Jombang	0%	0	APBD		100%	154.852.000
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	Kab. Jombang	0	0	APBD		15 unit	154.852.000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	100%	354.960.000	APBD		100%	404.724.960
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	3 laporan	144.000.000	APBD		3 Laporan	174.570.000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	12 laporan	210.960.000	APBD		12 Laporan	228.654.960

01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	0	0	APBD		1 Laporan	1.500.000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kab. Jombang	100 %	140.620.300	APBD		100%	362.289.975
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1 unit	40.110.000	APBD		1 unit	51.061.725
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	15 unit	61.440.300	APBD		15 unit	197.893.725
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	27 unit	29.070.000	APBD		27 unit	63.334.525

01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	1 unit	10.000.000	APBD		1 unit	50.000.000
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	Kab. Jombang	70%	43.488.150	APBD		80%	85.259.000
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase fasilitas pemenuhan legalitas koperasi	Kab. Jombang	85%	43.488.150	APBD		90%	85.259.000
2.17.02.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	20 Unit usaha	43.488.150	APBD		65 Unit Usaha	85.259.000
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Kab. Jombang	60%	56.511.850	APBD		65%	702.901.000

2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Kab. Jombang	60%	56.511.850	APBD		65%	702.901.000
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Jombang	80 unit usaha	56.511.850	APBD		240 Unit Usaha	702.901.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Kompeten	Kab. Jombang	18%	145.380.000	APBD		27%	550.000.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Kab. Jombang	10%	145.380.000	APBD		13%	550.000.000
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Jombang	135 org	145.380.000	APBD		500 org	550.000.000

2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	Kab. Jombang	14%	163.620.000	APBD		21%	510.000.000
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	Kab. Jombang	17%	163.620.000	APBD		22%	510.000.000
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Jombang	85 unit usaha	163.620.000	APBD		210 Unit Usaha	510.000.000
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	Kab. Jombang	3,50%	606.945.000	APBD		4%	1.020.000.000

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	Kab. Jombang	3%	606.945.000	APBD		3,5%	1.020.000.000
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Jombang	120 org	295.000.000	DAK NON FISIK		240 Org	150.000.000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Jombang	0	0			1 unit	150.000.000
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Jombang	0	0			25 unit usaha	100.000.000
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Jombang	200 Unit Usaha	138.147.000	APBD		2.350 unit usaha	90.000.000

2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Jombang	35 unit usaha	173.798.000	APBD		540 unit usaha	250.000.000
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Jombang	0	0	APBD		750 org	280.000.000
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat kualitasnya	Kab. Jombang	40%	293.055.000	APBD		60%	450.000.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	Kab. Jombang	0,9%	293.055.500	APBD		1%	450.000.000

2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kab. Jombang	75 unit usaha	293.055.000	APBD		90 unit usaha	450.000.000
-------------------	--	---	--------------	---------------	-------------	------	--	---------------	-------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Berikut ini disajikan tabel program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Ket
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	4,083,269,892.75	100	%	
a	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	8.919.450,00	100	%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.590.850,00	2	dok	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.328.600,00	5	dok	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	3,194,607,579.75	100	%	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,036,320,579.75	15	org	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149,472,000	4	dok	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4,740,000	17	lap	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,075,000	1	lap	
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	9,600,000	100	%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9,600,000	16	pakets	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	374,562,563	100	%	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12,000,000	1	paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	166,858,500	4	Paket	

	Penyediaan Bahan Logistik kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	79,160,000	2	paket	
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	27.641.600	2	paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	16.704.000	2	Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	72.198.463	2	Laporan	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemenuhan jasa penunjang Pemerintahan Daerah</i>	354,960,000	100	%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	144,000,000	3	laporan	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	210.960.000	12	laporan	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara secara rutin/rutin</i>	140,620,300	100	%	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40.110.000	1	unit	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.440.300,00	15	unit	

	perizinan Dinas Operasional atau lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000,00	1	unit	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29.070.000,00	27	unit	
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas	43.488.150,00	70	%	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase fasilitasi pemenuhan legalitas koperasi	43.488.150,00	85	%	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.488.150,00	20	Unit usaha	
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	56.511.850,00	60	%	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit	Persentase koperasi yang diawasi	56.511.850,00	60	%	

	Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	56.511.850,00	80	Unit usaha	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengalami pengembangan usaha	163.620.000,00	14	%	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang SDMnya difasilitasi	163.620.000,00	17%	%	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	163.620.000,00	85	Unit usaha	
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Kompeten	145.380.000,00	18	%	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	145.380.000,00	10	%	

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	145.380.000,00	135	org	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang meningkat Omset	606,945,000	3,5	%	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	606,945,000	3	%	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	295.000.000,00	120	org	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	138.147.000,00	200	Unit usaha	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	173.798.000,00	35	Unit usaha	
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase SDM Usaha Mikro terfasilitasi yang	293.055,000,00	40	%	

		meningkat kualitasnya				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang terfasilitasi	293.055,000,00	0.9		%
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog	293.055,000,00	75		Unit usaha
Total			5.392.269.893			

BAB V PENUTUP

Rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025. Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten Jombang Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah (Renstra). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jombang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Jombang, 12 Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jombang



FAHRUDIN WIDODO, S.H., M.M

NIP. 19641219199003100